

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian	15
1.4 Manfaat Penelitian	15
1.5 Kerangka Pemikiran	16
1.5.1 Kerangka Teori	16
1.5.2 Kerangka Konsep	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	35
2.1 Indonesia Sebagai Negara Hukum	35
2.2 Supremasi Hukum	38
2.3 Legal Drafting	42
2.4 Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	46
2.5 Hierarki Perundang-undangan	49
BAB III METODE PENELITIAN	53
3.1 Jenis Penelitian	53
3.2 Data dan Sumber Data	54
3.3 Metode Pendekatan	55
3.4 Teknik Pengumpulan Data	55
3.5 Analisis Data	56

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
4.1 Harmonisasi Pengaturan tentang Kompetensi (Kewenangan) Dalam Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kapal Ikan di Pelabuhan Belawan ditinjau dari UU. No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan UU. No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan	57
A. Kompetensi (kewenangan) dalam Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kapal Ikan di Pelabuhan Belawan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran	57
B. Kompetensi (kewenangan) dalam Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kapal Ikan di Pelabuhan Belawan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan	84
4.2 Keabsahan (legitimasi) Surat Persetujuan Berlayar yang Diterbitkan oleh Syahbandar Perikanan di Pelabuhan Belawan.	102
A. Keabsahan Surat Persetujuan Berlayar yang Diterbitkan Oleh Syahbandar Belawan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran	102
B. Keabsahan Surat Persetujuan Berlayar yang Diterbitkan Oleh Syahbandar Perikanan Belawan Belawan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan	105
4.3 Tanggung Jawab Hukum Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Belawan terkait dengan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kapal Ikan	110
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	116
5.1 Kesimpulan	116
5.2 Saran	118
DAFTAR PUSTAKA	120